



EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN PARIWISATA PADA FASILITAS PARIWISATA YANG ADA DI DESA PONDOKNONGKO, KECAMATAN KABAT, KABUPATEN BANYUWANGI

Kanom^{1*} Reynold Strada Purba^{2*} Shyma Arvilya
Tasya^{3*} Tegar Aprillian Maulana^{4*} Tiant Eka Sari^{5*} Vica Putri
Nurshaffa^{6*} Wahyu Hidayah^{7*} Yusrina Rahmi Kartika⁸

12345678 Politeknik Negeri Banyuwangi

Email Korespondensi : juniansyah396@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan kebijakan pariwisata di Desa Pondok Nongko dengan fokus pada infrastruktur dan fasilitas pariwisata, serta potensi wisata dan budaya daerahnya. Evaluasi dilakukan untuk memahami peraturan daerah yang telah diterapkan dan dampaknya terhadap pengembangan pariwisata lokal. Melalui penelitian ini, diidentifikasi hambatan implementasi kebijakan pariwisata berdasarkan kebijakan dan praktik lapangan, dengan harapan merancang renovasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan wisata di Desa Pondok Nongko. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan studi kelayakan melalui wawancara dan observasi langsung ke lokasi. Desa Pondoknongko memiliki potensi pariwisata besar, namun evaluasi menunjukkan minimnya fasilitas pariwisata di desa tersebut. Rekomendasi termasuk memberikan edukasi tentang lingkungan, membangun kembali potensi pariwisata, dan mengoptimalkan infrastruktur pariwisata untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata secara berkelanjutan. Evaluasi kebijakan pariwisata di Desa Pondok Nongko penting untuk memahami efektivitas implementasi kebijakan dan merancang strategi yang lebih baik untuk pengembangan pariwisata lokal. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas pariwisata di Desa Pondok Nongko diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor pariwisata secara berkelanjutan.

Kata Kunci: pariwisata, desa wisata, desa pondoknongko, kebijakan pariwisata, fasilitas pariwisata.



PENDAHULUAN

Desa Pondok Nongko di Banyuwangi berada dalam kebijakan no. 13 Tahun 2012. Kebijakan ini diperkenalkan sebagai pendekatan strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata lokal. Dalam konteks ini, sangat penting untuk menilai sejauh mana kehidupan Desa Pondok Nongko dalam kebijakan ini. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan kebijakan ini akan memungkinkan Anda mengambil keputusan yang lebih tepat mengenai peningkatan infrastruktur dan fasilitas pariwisata kota. Karena kekayaan sumber daya alam dan keunikan budaya daerahnya, Desa Pondok Nongko berpotensi menjadi objek wisata utama di Banyuwangi. Namun, untuk memahami potensi ini, penting untuk menilai sejauh mana peraturan daerah yang telah diterapkan dan dampaknya terhadap pengembangan pariwisata lokal. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang yang ada, strategi yang lebih baik dapat dikembangkan untuk meningkatkan

pariwisata dan meningkatkan peluang pariwisata di Desa Pondok Nongko. Melalui penelitian ini, kami berharap dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghambat implementasi kebijakan berdasarkan kebijakan dan praktik di lapangan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kendala-kendala tersebut, maka akan lebih mudah untuk merancang renovasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan wisata yang diinginkan di Desa Pondok Nongko. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan di wilayah Banyuwangi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

LANDASAN TEORI

Landasan teori berisikan teori-teori yang digunakan oleh peneliti sebagai dasar acuan teoritis dalam menjalankan kegiatan penelitian.

1. (Muryadi, 2017) Evaluasi adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Dalam studi tentang evaluasi, banyak sekali dijumpai model-model evaluasi dengan format atau sistematika yang berbeda, sekalipun dalam beberapa model ada juga yang sama.



JURNAL PARIWISATA PRIMA

Journal Homepage: <https://journal.poltekparprima.ac.id/index.php/utama>

Evaluasi kebijakan publik merupakan bagian atau tahap terakhir dari suatu kebijakan publik, dengan kata lain sebuah kebijakan publik tidak dapat dilepas begitu saja, melainkan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai "evaluasi kebijakan". Evaluasi kebijakan itu sendiri dilakukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Selain itu, evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan serta untuk mencari kekurangan sekaligus untuk menutup kekurangan. (Sirajuddin, 2014)

2. (Sirajuddin, 2014) Yang mengutip dari jurnal artikel (Mazmanian dan Sabatier, 1983) Implementasi kebijakan itu pada prinsipnya adalah cara atau langkah yang dilakukan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya kehidupan publik itu sendiri. (Sirajuddin, 2014) Kebijakan yang baik akan mandul tanpa dibarengi dengan iklim birokrasi yang sehat dan kondusif. Begitu pula birokrasi tidak akan berjalan dengan

efektif dan efisien tanpa ditopang dengan kebijakan yang tepat dan baik. (Solichin, 2015)

3. Salah satu hal yang terpenting dalam rangka pengimplementasian suatu kebijakan adalah perumusan kebijakan publik. Untuk itu, perumusan kebijakan publik sering disebut sebagai inti dari kebijakan publik itu sendiri. Pendapat ini didasarkan pada pernyataan bahwa setiap kebijakan publik ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik dalam rangka peningkatan kehidupan publik itu sendiri. (Sirajuddin, 2014)
4. Desa wisata merupakan salah satu contoh implementasi dari pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang memang menjadi agenda global. Komponen pembentuk desa wisata terdiri dari manajemen dan keterlibatan masyarakat, edukasi wisatawan, kemitraan, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pengolahan pariwisata yang baik pada sebuah daerah dapat menjadi branding yang dapat meningkatkan kuantitas pengunjung. (Karmilah, 2021) Keterlibatan atau partisipasi masyarakat sangat berpengaruh bagi keberlangsungan



suatu desa wisata, karena masyarakat juga merupakan aset suatu desa wisata. Menurut (Karmilah, 2021), Mengatakan bahwa Pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan sumber daya alam setempat dapat menjadi sebuah kawasan pariwisata atau yang selanjutnya disebut dengan desa wisata.

5. Menurut (Wati, 2022) sebagaimana dikutip dari jurnal (Dewi & Laksono, 2020) Fasilitas wisata merupakan suatu sarana dan prasarana yang disediakan oleh pengelola wisata yang dapat digunakan oleh wisatawan.
6. Perencanaan pariwisata memberikan pengetahuan dasar untuk pembangunan dan menentukan tujuan dari pengembangan pariwisata di destinasi tersebut untuk masa yang akan datang. Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. (Priatna & Ilhami, 2022)

Perencanaan fasilitas dapat terjadi di sektor mana saja terlebih pada sektor pariwisata, Untuk memenuhi kebutuhan

Wisatawan, harus tersedia berbagai macam fasilitas, Fasilitas penunjang wisata dalam sebuah destinasi dapat mencakup sarana dan prasarana yang dapat dinikmati pengunjung selama berada di kawasan objek wisata. Fasilitas-fasilitas untuk memenuhi kebutuhan perjalanan wisatawan saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain, sehingga dalam suatu perjalanan wisata, seluruh komponen fasilitas yang dibutuhkan tidak dapat dipisahkan. (Priatna & Ilhami, 2022)

Sehingga menurut beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah desa wisata yang memiliki kebijakan maka harus terimplementasikan, walaupun hasil implementasi tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, impresi juga pasti ada dalam sebuah kebijakan. Maka dari itu diperlukan adanya evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diberlakukan dalam sebuah desa wisata, dimana semata untuk meng-evaluasi hasil dari implementasi kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini terdiri dari beberapa langkah sistematis. Pertama, penemuan dan pemilihan responden dilakukan dengan memilih kepala desa dan staf terkait yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan



JURNAL PARIWISATA PRIMA

Journal Homepage: <https://journal.poltekparprima.ac.id/index.php/utama>

pariwisata di desa Pondok Nongko. Kedua, penyusunan pedoman wawancara dilakukan dengan mempertimbangkan proyek penelitian yang telah ditetapkan dan kerangka teori, termasuk pertanyaan terkait pemahaman kebijakan daerah Banyuwangi no. 13 Tahun 2012 dan implementasinya di desa. Tahap ketiga, wawancara langsung dilakukan terhadap responden terpilih dan seluruh tanggapan serta pendapat yang dikemukakan dicatat dengan cermat. Setelah dilakukan wawancara, langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan langsung ke Desa Pondok Nongko. Observasi dilakukan dengan fokus pada sifat lokasi wisata, struktur pendukung, aktivitas wisata dan interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal. Data yang diperoleh dari observasi dicatat secara sistematis dan kemudian dianalisis. Langkah terakhir adalah analisis data, yang melibatkan pengolahan dan interpretasi data yang dihasilkan dari wawancara dan observasi. Data dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema dan perspektif yang muncul serta memberikan Gambaran komprehensif mengenai implementasi kebijakan pariwisata di Desa Pondok

Nongko. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, diharapkan kajian ini tidak hanya memahami secara utuh realitas implementasi kebijakan pariwisata di desa, namun juga memberikan ide-ide penting untuk penyempurnaan kebijakan dan upaya ke depannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pondoknongko merupakan sebuah nama desa di wilayah Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa Pondoknongko merupakan desa agraris dikarenakan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, buruh tani dan nelayan. Desa yang memiliki luas 287 Hektar tersebut memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.522 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 1774 dan penduduk Perempuan sebanyak 1748 jiwa. Dan jumlah kepala keluarga sebanyak 1178. Desa atau Masyarakat agraris ialah masyarakat yang menggantungkan hidupnya secara ekonomi dan pemenuhan kebutuhannya pada bidang pertanian. Desa Pondoknongko ini memiliki berbagai macam potensi daya alamnya yang sangat indah seperti hamparan sawah hijau yang sangat luas, Pantai dengan pasir hitam yang sangat Panjang, atraksi wisatanya yang tinggi seperti



JURNAL PARIWISATA PRIMA

Journal Homepage: <https://journal.poltekparprima.ac.id/index.php/utama>

pengembangan Pantai Kedung Derus. Selain itu terdapat berbagai macam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seperti produksi gula merah dan gula semut, kerajinan tali kur, piring lidi dan lain sebagainya.

Berdasarkan PERDA Kabupaten Banyuwangi BAB VII Pasal 15 mengenai usaha pariwisata berdasarkan penelitian penulis di pondok nongko sendiri memiliki beberapa daya tarik wisata, salah satunya ialah Wisata Pantai Kedung Derus namun pada nyatanya untuk fasilitas pariwisata bisa di katakana tidak ada, seperti Wisata Pantai Kedung Derus dulunya merupakan tempat wisatawan menikmati keindahan pantai dan menikmati nuansa menggunakan perahu namun semenjak terjadinya abrasi pada tahun 2023 tidak ada lagi kegiatan kepariwisataan yang di lakukan oleh pengunjung bahkan untuk jalan masuk ke pantainya saja tidak ada pedagang dan penunjuk arah atau sejenisnya, adapun daya tariknya seperti Kampung Sayuran Organik, kampung sayuran organik ini merupakan daya tarik wisata yang mana di

gunakan oleh masyarakat dan pemerintah desa sebagai tempat workshop dan pelatihan atau akrab di kenal sebagai wisata edukasi dalam pengetahuan tanaman hortikultura dan tanaman toga, selain itu tempat ini juga sering digunakan untuk berbagai acara yang dimiliki desa seperti PKK dan pelatihan-pelatihan yang ada. Fasilitas yang tersedia di sana masih seadanya bahkan untuk tempat masih tidak terlalu luas dan untuk penanda pun hanya berupa banner. Serta fasilitas akomodasi seperti homestay atau villa di desa pondok nongko masih belum tersedia sama sekali. Pada hakikatnya keterlibatan masyarakat sangat krusial dan mempengaruhi terhadap keberlangsungan desa wisata dan sangat berpotensi besar desa ini untuk memproduksi kerajinan kriya akan hasil alamnya seperti kelapa. Kelapa merupakan pohon seribu guna yang bagian-bagiannya dapat bermanfaat dan fungsional. Sayangnya di desa ini mungkin kurang akan dorongan untuk memanfaatkan sumber daya masyarakat atau (*Community Based*) padahal berpeluang besar untuk menjadi aset untuk mendirikan fasilitas oleh-oleh di desa wisata rintisan ini. Sedang Fasilitas makan dan minum seperti restoran atau cafe masih belum terlihat ada di desa ini, hanya terdapat warung makan sederhana dan juga *food court* yang hanya ada di hari minggu yaitu pasar yang akrab di



JURNAL PARIWISATA PRIMA

Journal Homepage: <https://journal.poltekparprima.ac.id/index.php/utama>

sebut masyarakat setempat dengan Minggu Sehat dan Bersih. Pun seperti paket wisata di pondok nongko masih belum ada di karenakan DTW yang di tuju masih belum ada yang pasti dan atau konsisten dalam berkelanjutan.

Dalam rangka menerapkan kebijakan fasilitas pariwisata di desa pondok nongko ada beberapa hal yang bisa kami rekomendasikan : Pertama memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan dan merawat lingkungan serta dampak dari kemajuan pariwisata hal tersebut bisa di lakukan melalui pelatihan pelatihan dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Kedua dari pihak desa yang harus berupaya membangun Kembali dan menggali potensi yang ada di desa pondok nongko.

KESIMPULAN

Evaluasi kebijakan pariwisata di Desa Pondok Nongko menunjukkan bahwa meskipun desa ini memiliki potensi pariwisata yang besar, fasilitas pendukung pariwisata masih sangat minim. Potensi wisata alam seperti Pantai Kedung Derus mengalami penurunan aktivitas pariwisata setelah abrasi pada tahun 2023. Selain itu,

fasilitas akomodasi, paket wisata, dan pusat oleh-oleh belum tersedia dengan baik. Evaluasi ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap implementasi Evaluasi kebijakan pariwisata di Desa Pondok Nongko menunjukkan bahwa meskipun desa ini memiliki potensi pariwisata yang besar, fasilitas pendukung pariwisata masih sangat minim. Potensi wisata alam seperti Pantai Kedung Derus mengalami penurunan aktivitas pariwisata setelah abrasi pada tahun 2023. Selain itu, fasilitas akomodasi, paket wisata, dan pusat oleh-oleh belum tersedia dengan baik. Evaluasi ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap implementasi kebijakan dan upaya untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pariwisata guna mendukung pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan.

SARAN

1. Edukasi Masyarakat: Diperlukan program edukasi untuk masyarakat terkait pentingnya menjaga dan merawat lingkungan serta dampak positif dari kemajuan pariwisata. Pelatihan dan kegiatan kemasyarakatan bisa diadakan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga potensi wisata.
2. Pengembangan Infrastruktur: Pihak desa harus berupaya membangun kembali dan mengoptimalkan potensi yang ada dengan



JURNAL PARIWISATA PRIMA

Journal Homepage: <https://journal.poltekparprima.ac.id/index.php/utama>

memperbaiki dan menambah fasilitas wisata seperti akomodasi, pusat oleh-oleh, dan fasilitas pendukung lainnya.

3. Pemasaran dan Promosi: Strategi pemasaran yang efektif perlu dikembangkan untuk menarik wisatawan. Desa dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pelaku industri pariwisata untuk mempromosikan Desa Pondok Nongko sebagai destinasi wisata.

4. Kolaborasi dengan UMKM: Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di desa untuk memproduksi dan memasarkan produk lokal sebagai bagian dari atraksi wisata. Produk seperti gula merah, gula semut, dan kerajinan lokal bisa menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan Desa Pondok Nongko dapat mengembangkan sektor pariwisatanya secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat setempat

DAFTAR PUSTAKA

Karmilah, M. d. (2021). Digitalisasi wisata di desa wisata. *Jurnal Kajian Ruang* 15.

Muryadi. (2017). Model evaluasi program dalam penelitian evaluasi. *Jurnal Ilmiah Penjas*.

Priatna, & Ilhami. (2022). Perencanaan fasilitas sektor pariwisata di kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran (Studi kasus desa Cintaratu dan Selasari), *Jurnal Kewarganegaraan* .

Sirajuddin. (2014). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan publik dasar dibidang sosial di kota Makasar. *Jurnal Administrasi Publik*, 1-14.

Solichin. (2015). Implementasi kebijakan pendidikan dan peran birokrasi, *Jurnal Studi Islam*.

Wati, N. P. (2022). Pengaruh strategi promosi dan fasilitas pariwisata terhadap minat berkunjung wisatawan, *Jurnal Manajemen, Kewirausahaan dan Pariwisata*, 1-7.

